

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya, hal ini sangat penting karena pendidikan saat ini mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk keberhasilan pembangunan bangsa dan negara.

Lembaga pendidikan di Indonesia salah satunya ialah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang guna mencapai Indonesia Maju sesuai dengan visi, misi tujuan, sasaran, peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia menuju lulusan yang unggul. Untuk itu, melalui pendidikan SMK ini bertujuan yang berorientasi pada lulusan yang sudah dibekali untuk mempersiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja yang dibekali dengan keahlian maupun keterampilan yang berbeda-beda sesuai bidang studinya masing-masing.

Pendapat Arikunto (1993, hlm. 5) pendidikan kejuruan didefinisikan sebagai pendidikan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa memasuki bidang pekerjaan tertentu atau untuk meningkatkan mutu profesional di dunia kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "*Sekolah Menengah Kejuruan yang merupakan pendidikan kejuruan yang dibentuk pemerintah untuk mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang diminati*". (Perpustakaan Nasional, 2022).

Maka dari itu setiap individu pasti akan memasuki dunia kerja ketika sudah siap dengan beberapa kemampuan yang dimiliki. Dari pendapat menurut Siagian (2002, hlm. 40), menjelaskan bahwa ada beberapa kemampuan pekerjaan salah satu contohnya yang bersifat fisik, yang dimana ini lebih diperlukan oleh karyawan yang dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak menggunakan otot. Selain fisik, di lain pihak ada kemampuan yang bersifat mental intelektual, yang lebih banyak dituntut oleh penyelesaian tugas pekerjaan dengan menggunakan otak. Pernyataan tersebut

mengindikasikan bahwa kemampuan kerja yang dimiliki seseorang harus relevan dengan ketersediaan atau macam-macam pekerjaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, saat ini mayoritas tenaga kerja mengenal nilai pendidikan tidak hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga dari segi keterampilannya seperti cara berkomunikasi, sikap kerja, serta mental kerja. Ini akan membantu pekerja mengembangkan etika kerja yang baik sesuai dengan standar industri.

Namun, kenyataan masih rendahnya kualitas lulusan di Indonesia itu misalnya pengakuan kasus dari Lina Marianti, pencari eksekutif (headhunter) di JAC Recruitment, Jakarta. Menurut dia, perusahaan asing menolak lebih dari setengah lulusan yang dia rekomendasikan untuk dipekerjakan. Kami merekomendasikan lulusan-lulusan terbaik, tetapi yang terbaik itu pun tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan perusahaan, kata Lina. "Mereka (pemberi kerja) mengeluh, lulusan lokal tidak mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik. Mereka lemah dalam keterampilan kepemimpinan dan analitis. Mereka buruk dalam bahasa Inggris dan pengetahuan produk" tuturnya yang dilansir dalam ([www.esq-news.com](http://www.esq-news.com)).

Gambaran tersebut menyiratkan banyak hal. Pertama, kualitas lulusan. Kedua, penerimaan pasar pengguna. dan ketiga, kesiapan lulusan dalam menghadapi perubahan. Penyediaan lulusan yang berkualitas mengisyaratkan bukan saja pengetahuan, tetapi juga keahlian/kecakapan spesifik yang dibutuhkan oleh pasar pengguna.

Adapun fakta bahwa kualitas lulusan SMK ini secara umum belum mencapai tujuan yang diharapkan, yakni masih belum banyaknya keterserapan kerja dari lulusan SMK. (Badan Pusat Statistik, 2021) dalam laporan data terbarunya pada Agustus 2020 - Agustus 2021, bahwa pengangguran tingkat pendidikan SMK masih di dominasi tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Dengan memanfaatkan data dari survei ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPS tersebut. Kajian ini menunjukkan bahwa kontribusi lulusan SMK yang menganggur terhadap pengangguran nasional selalu meningkat untuk tiap tahunnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin banyaknya siswa SMK

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

yang lulus, tetapi tidak terserap di dunia kerja membuat pengangguran dari jenjang ini cukup tinggi.

Dari Ardali (2020, hlm. 21) menyebutkan bahwa jika masih banyak lulusan SMK yang masih menganggur, hal tersebut menunjukkan mutu lulusan yang rendah karena belum sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Namun demikian, terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran, antara lain ketatnya persaingan yang disebabkan tingginya angka angkatan kerja. Artinya, ketatnya persaingan di dunia kerja menyebabkan angka pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Maka dalam era persaingan yang semakin ketat ini, mutu lulusan menjadi semakin penting bagi lembaga pendidikan dan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memperhatikan mutu pendidikan yang diberikan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja. Untuk itu, lulusan SMK harus mengantongi sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu membuka lapangan usaha baru ataupun kegiatan baru di lingkungannya.

Ardali (2020, hlm. 23) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa saat ini, beberapa pengelola SMK mengaku telah link and match dengan menunjukkan sejumlah lulusannya yang diserap dunia kerja, bahkan ada yang dipesan sebelum peserta didik lulus. Tetapi, tidak sedikit juga SMK yang terus mengeluarkan lulusan tanpa dapat menelusuri nasib alumninya, sehingga masih terdapat fenomena rendahnya mutu lulusan.

Fenomena diatas dapat menyebabkan rendahnya tingkat mutu SDM terpelajar dan ketidakpastian lulusan SMK dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah masih terpisah dengan tata kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, masih terdapat aspek-aspek yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah seakan-akan terpisah dari kenyataan yang ada dan berkembang kehidupan nyata (masyarakat). Sebagai akibatnya, masih terdapat lulusan SMK yang belum siap menghadapi kenyataan dalam kehidupan, dalam konsep dijelaskan bahwa proses pembelajaran di SMK berusaha membentuk insan siap kerja, tetapi masih banyak fakta yang siap latih. Ujung-ujungnya, lulusan

sulit diterima di dunia kerja dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, maka jumlah lulusan banyak yang menambah panjang angka pengangguran.

Melihat kasus beberapa tahun terakhir diatas, jumlah tamatan SMK selalu menjadi yang tertinggi dalam menyumbang angka pengangguran. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhri dan Yufriawati (2017, hlm. 10), secara umum bahwa waktu tunggu lulusan SMK untuk memperoleh pekerjaan ialah sekitar 6-12 bulan lamanya. Padahal, SMK termasuk dalam vokasi yang seharusnya para lulusan SMK sudah siap kerja dengan bekal keterampilannya namun faktanya SMK ini mengalami indikasi belum berjalannya dengan efektif. Sejalan hal itu menurut (Yulianti & Khafid, 2015) menyatakan bahwa wawasan dunia kerja dan kompetensi keahlian memiliki hubungan yang signifikan dengan kesiapan peserta didik memasuki dunia kerja. Penentuan tingkat kompetensi menjadi sangat penting bagi peserta didik sebagai calon tenaga kerja dalam meningkatkan keterserapan di dunia kerja. Ditinjau dari segi personal, semakin tinggi kompetensi maka akan semakin tinggi pula nilai tambah yang dihasilkannya. Kemudian, semakin tinggi produktivitasnya maka akan semakin tinggi keterserapan yang bersangkutan di dunia kerja. Artinya, ketika semakin tinggi kompetensi yang dimiliki peserta didik ini maka akan semakin tinggi keterserapannya di dunia kerja nanti.

Dari pernyataan Malik (1990, hlm. 122) pendidikan kejuruan ialah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Sejalan dengan tujuan SMK yaitu sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Adanya tuntutan tersebut, maka SMK harus mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan tentunya siap kerja, yaitu dengan memiliki bekal sertifikat kompetensi yang dimana keterampilannya sudah sesuai dengan pekerjaannya.

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bagian dari dunia pendidikan berfungsi sebagai penyedia dan penyiapan sumber daya manusia secara individu, sedangkan masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri sebagai pihak yang

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

membutuhkan dan menggunakan para lulusan SMK. Dengan kata lain, jika sejak awal perancangan pendidikan di SMK sudah memiliki relevansi dengan DU/DI, maka lulusan akan sudah diserap karena memang sudah terdapat keterkaitan dan kecocokan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yono (2014), yang berjudul “Model “Diklastri” Sebagai Alternatif Meningkatkan Mutu Lulusan SMK, salah satu kriteria lulusan yang bermutu adalah terjaminnya lapangan kerja bagi lulusan SMK, karena langsung direkrut oleh industri setelah tamat”. Artinya, lulusan SMK dikatakan bermutu apabila setelah lulus langsung diterima sebagai pegawai di industri tertentu, atau bahkan telah dipesan sebelum peserta didik menamatkan pendidikannya.

Perangkat kebijakan lainnya sebagai pendukung pencapaian lulusan yang bermutu sudah lengkap dan jelas. Artinya, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan menggunakan pendekatan yang komprehensif serta didesain berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, agar dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan diberlakukan secara otonomi kepada satuan pendidikan (sekolah). Jika ditarik benang merah tentang amanat pendidikan yang bermutu agar menghasilkan lulusan yang bermutu, amanat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperbaharui melalui Permendikbud Nomor 32 Tahun 2013, dilengkapi dengan suatu badan yang bertugas mengawal kebijakan tersebut, yaitu dengan dibentuknya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kemudian, amanat tentang mutu tersebut, diurai lebih detail melalui delapan standar, pada Bab II, Pasal 2, PP 19 Tahun 2005, yaitu : a) standar Isi; b) standar proses; c) standar kompetensi lulusan; d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; e) standar sarana dan prasarana; f) standar pengelolaan; g) standar pembiayaan; dan h) standar penilaian pendidikan. Kemudian, setiap standar diurai lebih rinci dan bersifat operasional melalui Peraturan Menteri. Khusus tentang Standar Kompetensi Lulusan, didasari Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

tentang SKL, yang diperbaharui melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan menengah.

Dari informasi diatas peneliti juga melakukan pencarian informasi terkait dengan salah satu bagian pihak Hubungan Industri yang ada di SMKN 1 Bandung, SMKN 3 Bandung, dan SMKN 11 Bandung. Dari informasi yang didapat yaitu ada fenomena bahwa selama tiga tahun kebelakang ini permasalahan yang paling terlihat adalah adanya ketidak stabilan kualitas para lulusan siswa yang terserap didunia kerja yang terrangkum pada data tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Lulusan yang Bekerja, Melanjutkan dan Belum Memperoleh Pekerjaan Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Negeri 1 Bandung**

Thn	Jumlah Siswa		Bekerja		Mem-buka Lapangan Kerja Sendiri	Melanjut kan ke PT	Belum Memperoleh Kerja
	Lulusan Peserta Program Sertifikasi OTKP	Jumlah & Persentase	Sesuai Kompetensi Keahlian	Di luar Kompetensi Keahlian			
2019 / 2020	135	Jumlah	11	7	13	31	9
		Persen	8,03%	4,97%	10%	23,44%	6,67%
2020 / 2021	137	Jumlah	2	4	4	15	11
		Persen	2,11%	3%	3%	11%	8,03%
2021 / 2022	95	Jumlah	25	3	3	19	43
		Persen	25,98%	3%	3,05%	20,05%	45,26%

*Sumber: Bagian Hubungan Industri SMK Negeri 1 Bandung (data diolah)*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa data lulusan yang diketahui adanya jumlah bekerja sesuai kompetensi keahlian terdapat penurunan yang signifikan pada Tahun Ajaran 2020/2021 dibandingkan Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2021/2022. Apabila dilihat secara keseluruhan persentase kelulusan siswa yang

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

bekerja sesuai kompetensi keahlian pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,11%.

Berdasarkan pada data tersebut artinya kualitas lulusan siswa mengalami penurunan drastis, yang dimana pada saat tahun 2020 ini sekolah melakukan pembelajaran secara virtual yang akibatnya kualitas lulusan peserta didik menjadi berkurang. Sehingga efektivitas program sertifikasi kompetensi ini belum optimal akibatnya peserta didik mengalami penurunan dalam proses ujian.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, yaitu di SMK Negeri 1 Bandung menunjukkan bahwa adanya penurunan kualitas lulusan siswa yang terserap didunia kerja, dapat dilihat bahwa angka lulusan siswa yang terserap kerja maupun yang masih pengangguran.

**Tabel 1.2**

**Lulusan yang Bekerja, Melanjutkan dan Belum Memperoleh Pekerjaan Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Negeri 3 Bandung**

Thn	Jumlah Siswa		Bekerja		Mem-buka Lapangan Kerja Sendiri	Melanjut kan ke PT	Belum Memperoleh Kerja
	Lulusan Peserta Program Sertifikasi OTKP	Jumlah & Persentase	Sesuai Kompetensi Keahlian	Di luar Kompetensi Keahlian			
2019 / 2020	172	Jumlah	10	9	5	48	105
		Persen	7%	5%	2%	23%	63%
2020 / 2021	118	Jumlah	17	5	5	39	52
		Persen	21%	3%	3%	23%	50%
2021 / 2022	123	Jumlah	60	13	5	30	15
		Persen	40%	15%	3%	23%	19%

*Sumber: Bagian Hubungan Industri SMK Negeri 3 Bandung (data diolah)*

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah lulusan pada Tahun Ajaran 2021/2022 ada 123 orang, tercatat bahwa siswa yang bekerja sesuai kompetensi

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

maupun yang diluar kompetensi keahlian lebih besar yang menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan, dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 dan 2020 juga masih banyaknya yang belum memperoleh pekerjaan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya persiapan siswa yang akan melaksanakan ujian program sertifikasi kompetensi, sehingga efektivitas pelaksanaan ujiannya diduga belum optimal akibatnya siswa mengalami penurunan dalam proses pelaksanaan sertifikasi.

**Tabel 1.3**

**Lulusan yang Bekerja, Melanjutkan dan Belum Memperoleh Pekerjaan Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Negeri 11 Bandung**

Thn	Jumlah Siswa		Bekerja		Mem-buka Lapangan Kerja Sendiri	Melanjut kan ke PT	Belum Memperoleh Kerja
	Lulusan Peserta Program Sertifikasi OTKP	Jumlah & Persentase	Sesuai Kompetensi Keahlian	Di luar Kompetensi Keahlian			
2019 / 2020	136	Jumlah	68	10	7	35	16
		Persen	50%	8,18%	5,3%	21,6%	12,6%
2020 / 2021	105	Jumlah	22	37	7	19	16
		Persen	18,3%	34%	7,2%	17,38%	14,8%
2021 / 2022	106	Jumlah	23	13	32	36	2
		Persen	23%	11,6%	28,9%	33,6%	2,9%

*Sumber: Bagian Hubungan Industri SMK Negeri 11 Bandung (data diolah)*

Dari data di atas, menunjukkan bahwa adanya jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan tertinggi di SMKN 11 Bandung yaitu pada Tahun Ajaran 2021/2022. Kemudian pada Tahun 2021 pula jumlah pengangguran siswa menunjukkan adanya penurunan yaitu 2,9%.

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Kualitas lulusan SMKN 11 Bandung ini juga mengalami penurunan pada Tahun Ajaran 2020/2021 yang dimana pada saat itu ujian kompetensi dilaksanakan secara daring yang mana siswa belum mempersiapkan terlalu matang. Sehingga efektivitas pembelajaran diduga belum optimal dan siswa mengalami penurunan dalam hasil ujiannya.

Berdasarkan analisis pada tabel data-data SMK Negeri di Kota Bandung diatas, maka dapat diketahui bahwa lulusan pada Kompetensi Keahlian OTKP SMK Negeri di Kota Bandung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, peserta didik yang kegiatan setelah lulusnya memilih untuk bekerja mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.

Dari ketiga tabel diatas, kualitas lulusan siswa mengalami penurunan yaitu pada awal pandemi 2020 terutama selama dilaksanakannya pembelajaran virtual sehingga efektivitas program sertifikasi kompetensi ini masih belum optimal akibatnya siswa mengalami penurunan dalam proses ujian. SMK di Kota Bandung ini memiliki tujuan yaitu dalam penerapan pengembangan kualitas lulusannya dalam meningkatkan kualitas lulusan tenaga kerja melalui pemberian kesempatan untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran yang diampunya dengan mengikuti program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan disekolah.

Dalam penelitian Ardali (2020, hlm. 20) SMK masih terdapat kelemahan dalam hal penerapan nilai-nilai dalam kehidupan Secara perivikatif, implementasi program sertifikasi kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu lulusan SMK dengan besaran pengaruh 40.70%, sisanya 59,30% dipengaruhi faktor oleh lain.

Namun nyatanya, pernyataan yang seharusnya SMK ini diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi sehingga program sertifikasi kompetensi menjadi tujuan utama SMK yang menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara mandiri maupun di industri atau pasar kerja lainnya ini ternyata masih belum stabil masih ada penurunan ditiap tahunnya. Selaras dengan pernyataan diatas, realitanya yaitu lulusan SMK ini masih banyak yang menjadi pencari kerja, namun hanya sedikit yang mampu menerapkan keterampilannya yang diperoleh selama di sekolah.

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Maka dari itu, ada sebuah pendapat dari Purwanto (2010, hlm. 8), terkadang ada sebagian besar sekolah yang mengaggap sertifikasi ini hanya menjadi formalitas sebagai konskuensi adanya pelaksanaan program sertifikasi kompetensi disekolah. Pendapat Setyowati, dkk (2017, hlm. 70) Namun, sertifikasi terhadap kompetensi profesi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baik dari segi prosedur, kebijakan administrasi, dan persyaratan sertifikasi harus sesuai dengan kriteria standar sertifikasi, jelas dan jujur terhadap setiap calon, dan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberian sertifikat kompetensi karena Lisensi LSP ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa pengakuan mengenai kompetensi yang dimiliki oleh para peserta didik profesional. Pengakuan yang dimaksud diakui langsung secara formal dalam bentuk sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).

Menurut Mulyasa (2013, hlm. 34) Upaya penjaminan mutu ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang sesuai untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem program sertifikasi. Sertifikasi kompetensi atas keahliannya ini akan memberikan tolok ukur keterampilan bagi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaannya secara kompeten dan profesional. Lanjut pernyataan dari Mulyasa (2013, hlm. 35) penjaminan mutu ialah adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap pembelajaran peserta didik yang telah ditempuh yang akan menimbulkan persepsi masyarakat maupun persepsi penyedia pekerjaan menjadi lebih baik terhadap program sertifikasi profesi. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya peserta didik akan makin menghargai program profesi dan sebaliknya program sertifikasi profesi ini juga dapat memberikan jaminan kepada para peserta didik.

Lanjut, Novrizal (2020, hlm. 189) menerangkan, pendidikan SMK di Indonesia ini harus selalu memperbaiki pencapaian mutu lulusannya. Adapun belum maksimalnya pencapaian mutu lulusan SMK saat ini secara nasional teridentifikasi dalam pokok masalah berikut yaitu tingginya rasio pengangguran terbuka lulusan SMK per jenjang pendidikan dibandingkan dengan SMA dan lain-lain. Ketidakselarasan antara DU/DI dan mutu lulusan merupakan salah satu faktor

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

penyebab penyerapan lulusan SMK di DU/DI rendah. Lanjut sebagaimana dari Novrizal (2020, hlm. 192) pernyataan mutu lulusan sendiri dipahami dari makna yang dijadikan salah satu sasaran mutu pendidikan, yaitu produknya atau lulusan (siswa/peserta didik).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada SMKN 1 Bandung, SMKN 3 Bandung dan SMKN 11 Bandung dengan judul “Efektivitas Program Sertifikasi Kompetensi Terhadap Penjaminan Mutu Lulusan (Studi Kasus Pada LSP SMK Negeri Bidang Keahlian Bisnis & Manajemen di Kota Bandung)”.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Dilihat dari fenomena latar belakang yang telah diuraikan bahwa selama program sertifikasi kompetensi ini pada permasalahan mutu lulusan di SMK masih belum terserap banyak didunia kerja, khususnya pada kompetensi keahlian OTKP SMK di Kota Bandung. Akibatnya fenomena tersebut akan berdampak kepada kualitas lulusan disekolah. Seperti yang diketahui dalam mempersiapkan siswa SMK sebagai tenaga kerja tingkat menengah, kerap ditemui adanya masalah. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masih terdapat kesenjangan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan riil pihak DU/DI, di mana lulusan SMK masih lemah dalam aspek keterampilan (Dit. PSMK, 2008). Kesenjangan ini salah satunya dapat diindikasikan dengan rendahnya daya serap tenaga kerja lulusan SMK oleh DU/DI atau pasar kerja lainnya.

Dalam mengatasi permasalahan rendahnya daya serap lulusan SMK ini, maka masing-masing SMK perlu melakukan upaya guna meningkatkan sumber daya pendidikan yang ada di SMK secara efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar lulusan SMK dapat terserap dan bersaing dengan lulusan SMK lain maupun tenaga kerja lulusan SMA yang jumlahnya semakin banyak dan mutunya pun semakin baik. Berbagai permasalahan yang berhubungan dengan relevansi kompetensi yang dihasilkan SMK dan daya saing para lulusan SMK perlu dicarikan alternatif pemecahannya, agar tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK dapat menurun tajam di masa mendatang. Untuk itu perlu dilakukannya suatu sertifikasi

kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja agar meningkatkan daya saing lulusan SMK dalam memperoleh pekerjaan.

Maka dari itu, salah satu upaya untuk lulusan yang terjamin yaitu dengan menjamin kompetensinya yakni dengan program yang tepat menjamin kompetensi lulusan adalah dengan program sertifikasi kompetensi.

Menurut Setyowati (2017, hlm. 69) cakupan pengetahuan dalam program kompetensi didapatkan melalui pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya, pelatihan-pelatihan yang sesuai serta diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan pengetahuan yang didapat dalam pengalaman yang telah terverifikasi oleh pihak LSP. Merujuk pada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi LSP yaitu:

“LSP P1 (Pihak Kesatu) lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP”.

Maka dari itu, dapat diartikan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang sah yang terdiri dari para pemangku yang memiliki keahlian di berbagai industri, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan individu yang bekerja di bidang atau industri terkait. Dari pendapat Setyowati (2017, hlm. 68) LSP juga merupakan badan yang memberikan kompetensi keterampilan serta keahlian yang telah diakreditasi dan dilisensikan oleh BNSP. Perizinan diberikan melalui proses akreditasi BNSP yang memiliki kewenangan menyatakan bahwa LSP yang terkait telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi. LSP memperkenalkan dengan tujuan menonjolkan kualifikasi peserta didik bagi mereka yang mencari pekerjaan dan profesional di dunia kerja. Sertifikasi yang diperoleh bisa menjadi bukti positif bahwa para lulusan di SMK ini memiliki kualifikasi yang tinggi pada bidang pekerjaannya.

Pembentukan dan percepatan lisensi oleh pemerintah ini terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di tiap Sekolah Menengah Kejuruan dimaksudkan untuk

mempercepat proses sertifikasi bagi lulusannya, agar kompetensi lulusan SMK dapat diakui oleh mana pun.

Implementasinya dilapangan banyak ditemukan permasalahan teknis baik berkaitan dengan pembentukan LSP di SMK maupun proses manajemen LSP itu sendiri. Terkait dengan persyaratan administrasi untuk proses lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), persyaratan yang harus dipenuhi cukup ketat. Terutama untuk mendapatkan lisensi pada lingkup skema yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di tiap SMK, begitu juga proses pelaksanaan ataupun manajemen LSP di sekolah itu sendiri.

Permasalahan selanjutnya adalah dari segi keterbatasan jumlah asesor dan alokasi dana pengembangan LSP yang dirasakan cukup besar sehingga sedikit banyak memengaruhi perkembangan ruang gerak LSP di SMK. Rangkap jabatan dalam kepengurusan LSP menjadi salah satu kendala yang cukup besar juga dalam pengembangan LSP dikarenakan personil LSP yang keseluruhan memiliki posisi strategis di masing-masing manajemen sekolah sehingga secara langsung memengaruhi dalam pengembangan LSP itu sendiri. Namun, pada bulan Juni 2018 LSP SMK Negeri di Kota Bandung dilibatkan kembali dalam bimbingan teknis penyusunan dokumen menuju lisensi dalam penambahan ruang lingkup seiring dengan dilakukannya pembaruan di personil LSP. Namun tetap saja LSP SMK harus selalu memperhatikan setiap kendala yang ada guna menghasilkan kualitas lulusan yang di butuhkan di dunia kerja (LSP SMKN 3 Bandung, 2020). Maka pengembangan skema sertifikasi LSP SMK Negeri di Kota Bandung ini harus sudah bekerjasama lebih luas lagi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) yang sesuai. Karena ternyata masih banyak lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang di sebabkan kompetensi lulusan SMK belum semuanya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Maka dari itu peran dari Komite Skema LSP SMK Negeri di Kota Bandung ini sangat penting untuk senantiasa memelihara Materi Ujian Kompetensi (MUK) agar tetap sesuai dengan kebutuhan industri. Permasalah yang akan datang selanjutnya yaitu akan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing yang masuk ke negara kita.

*Rosyika Trigiani, 2023*

**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Dari semua permasalahan ini jika dibiarkan akan semakin fatal dan akan mempengaruhi aspek-aspek lain yang lebih luas di waktu yang akan datang sebab siswa SMK setelah lulus dan siap untuk melamar pekerjaan bukan hanya sebatas Ijazah akan tetapi harus mengantongi sertifikasi profesi sesuai bidangnya. Tidak hanya itu sertifikat yang sudah dinyatakan lulus tersebut apakah sudah sesuai karena sertifikat kompetensi tersebut akan menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran dan sebagai indikator dari kelulusan. Karena jika belum sesuai penilaian sertifikat tersebut akan dipertanyakan dan menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan di dunia industri yang diinginkan. Merujuk pada pernyataan Fattah (2012, hlm 5-6) maka perbaikan dan peningkatan mutu lulusan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai kebijakan. Oleh karenanya, penjaminan mutu ini menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak (Mutu adalah Tanggung Jawab Bersama).

Oleh karena itu, memperoleh sertifikat kompetensi sangat penting bagi seluruh siswa SMK untuk melamar pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka miliki. Maka dari itu, setiap industri akan segera mengakui sertifikasi ini karena praktik standar telah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Merujuk dari pernyataan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran efektivitas program sertifikasi kompetensi pada LSP P1 SMK Negeri di Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran tingkat penjaminan mutu lulusan pada LSP P1 SMK Negeri di Kota Bandung?
3. Adakah pengaruh efektivitas program sertifikasi kompetensi terhadap penjaminan mutu lulusan pada LSP P1 SMK Negeri di Kota Bandung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan melakukan kajian secara ilmiah tentang program sertifikasi kompetensi terhadap penjaminan kualitas lulusan siswa OTKP SMK Negeri 1 Bandung, SMK Negeri 3 Bandung dan SMK Negeri 11 Bandung. Analisis tersebut diperlukan untuk

*Rosyika Trigiani, 2023*  
**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TERHADAP PENJAMINAN MUTU LULUSAN (STUDI KASUS PADA LSP SMK NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG)**

mengetahui pengaruh program sertifikasi kompetensi terhadap penjaminan mutu lulusan SMK Negeri di Kota Bandung.

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara valid dan reliabel tentang gambaran efektivitas program sertifikasi kompetensi pada LSP P1 SMK Negeri di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui secara valid dan reliabel tentang gambaran tingkat penjaminan mutu lulusan pada LSP P1 SMK Negeri di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui secara valid dan reliabel tentang pengaruh efektivitas program sertifikasi kompetensi terhadap penjaminan mutu lulusan pada LSP P1 SMK Negeri di Kota Bandung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Pada manfaat penelitian ini terdiri menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, kedua manfaat tersebut yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai program sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan SMK dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang apabila sesuai dengan judul penelitian penulis.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan peserta didik untuk melihat capaian kompetensi keahlian secara efektif dan efisien. Dan juga dapat menjadi bahan evaluasi dari program sertifikasi kompetensi khususnya pada bidang keahlian Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran dalam meningkatkan kualitas lulusan agar penyerapan lulusan di dunia usaha dan di dunia industri (DU/DI) yang dibutuhkan sesuai harapan.

## 2. Bagi Sekolah

Hasil keputusan tingkat kompetensi keahlian dapat dijadikan bahan masukan atau evaluasi sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan peserta didiknya dan untuk lebih memperhatikan dalam upaya program sertifikasi profesi untuk meningkatkan efektivitas.

## 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan ilmu kajian perbandingan maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang akan mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk mengestimasi peningkatan kompetensi keahlian SMK.